

# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

## **SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
I.1    Latar Belakang.....	1
I.2    Landasan Hukum.....	2
I.3    Maksud dan Tujuan.....	3
I.4    Sistematika Penulisan.....	4
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
II.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
II.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
II.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.3.1    Analisis Tingkat Kinerja.....	15
2.3.2    Permasalahan.....	15
2.3.3    Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi.....	16
II.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
II.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
III.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
III.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	31
III.3    Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
BAB V    PENUTUP.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	8
Tabel T-C.30	Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan .....	14
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	17
Tabel T-C.32	Usulan prgoram dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 .....	28
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2022 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Walikota Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2023 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2023. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan

- dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
  - II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
  - II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

**BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.



**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023, diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2022. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2021) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat disajikan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016-2021	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas</b>										
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	Persen	100	-	44,44	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penindakan pelanggaran Perda yang dilaksanakan	Kali			13	8	8	8	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan fisik/stamina beladiri yang dilaksanakan	kali			0	6	6	6	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan sarasehan kantrantibmas yang dilaksanakan	Kali			0	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan PAM Insidental yang dilaksanakan	Kali			90	96	96	96	100	Tercapai
	- Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan	hari			365	365	365	365	100	Tercapai
	- Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	hari			90	120	120	120	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan	Kegiatan			4	4	4	4	108	Tercapai
	- Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov. HUT Tk. Kota)	kali			47	25	27	27	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan	kali			0	220	220	220	100	Tercapai

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016-2021	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
	- Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	Kali			0	48	48	48	100	Tercapai
3	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	kali			48	48	48	48	100	Tercapai
4	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	Persen	100	-	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang dilaksanakan	Kali			3	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan pelatihan pemadam kebakaran yang dilaksanakan	kali			3	5	5	5	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan inspeksi alat kebakaran ke OPD/Perusahaan	kali			0	24	24	24	100	Tercapai
	- Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahay kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	Kejadian			179	180	194	194	107	Tercapai
	- Jumlah peralatan pemadam kebakaran yang diadakan	Buah			0	24	24	24	100	Tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	Orang			2	2	2	2	100	Tercapai
6	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Persen	100	-	99,35	100	98,71	98,71	98,71	Akan Tercapai
	- Jumlah kegiatan intelegen (deteksi dini, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dll) yang di laksanakan	kali			72	12	12	84	100	Tercapai
	- Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksar	Orang			0	25	25	25	100	Tercapai

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016-2021	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
	- Jumlah operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	kali			0	24	24	24	100	Tercapai
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan SIM Penegakan Perda	Kali			0	5	5	5	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan operasi yustisi/PPKM	Kali			0	3	3	3	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	kali			0	12	12	16	100	Tercapai
<b>Urusan Rutin</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	Dokumen			0	1	1	1	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	Dokumen			0	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	Dokumen			0	4	4	4	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	Dokumen			0	4	4	4	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Dokumen			0	0	0	0	0	Tidak Tercapai
	- Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan			0	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen			0	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016-2021	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
	- Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen			1	1	1	1	100	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Stel			0	10	10	10	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit			0	26	26	26	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Orang/kali			0	100	60	60	60	Tidak Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016-2021	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah									
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit			28	28	28	28	100	Tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit			2	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala perlatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	100	Tercapai

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang menjadi target pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.



Tabel. T.C-30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan  
Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM			50	60	70	70	50	60	70	80	
2	Persentase penanganan bencana kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			60	62	64	68	60	65	64	68	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum			80	85	90	95	100	100	90	95	
6	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			20	20	20	20	20	20	20	20	
7	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			8	11	13	16	8	5	13	16	
8	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	

## II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi 6 yaitu “Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah” dengan Tujuan “Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum” dan misi 7 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Dalam pencapaian tujuan “Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum”, sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”, dengan Indikator Kinerja “Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SPM”. Capaian Indikator Kinerja tersebut pada tahun 2021 sebesar 100%. Pencapaian tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, sasaran “Meningkatnya penanganan bencana kebakaran” dengan indikator kinerja “Persentase penanganan bencana kebakaran” pada tahun 2021 sebesar 100%.

### 2.3.2 Permasalahan

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;

6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai).

### **2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi**

Menjaga ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah” dan misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

## **II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD Tahun 2023 merupakan awal dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun berikutnya yang bersifat skala prioritas. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Adapun dalam penyusunan Renja tahun 2023 hal-hal yang diperhatikan sebagai bahan pertimbangan adalah identifikasi Program/kegiatan/sub kegiatan Review terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel T-C.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	1. <b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b> 2. <b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b> 3. <b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>5.432.944.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	1. <b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b> 2. <b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b> 3. <b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>5.117.274.000</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>62.450.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>16.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen renja yang disusun 2. Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	2 dokumen  1 dokumen	10.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen renja yang disusun 2. Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	2 dokumen  1 dokumen	2.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun 2. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) 3. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	4 dokumen  2 dokumen  12 bulan  5 dokumen	50.050.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	1. Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun 2. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) 3. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	4 dokumen  2 dokumen  12 bulan  5 dokumen	12.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.350.827.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.257.134.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.297.177.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.203.484.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	52.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	52.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.650.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD					SKPD					
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>93.265.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>93.265.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	9.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	11 kali	83.765.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekalongan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	11 kali	83.765.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>224.439.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>239.439.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 bulan  0 unit	34.939.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 bulan  0 unit	34.939.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	97.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	97.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	124 kali	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	75 kali	80.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>130.458.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>130.458.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	128.458.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	128.458.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>571.505.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>464.743.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	28 unit	380.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	28 unit	444.743.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	171.505.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>64 persen</b>	<b>6.255.724.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>64 persen</b>	<b>5.850.299.000</b>	
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>90 persen</b>	<b>1.822.410.000</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>90 persen</b>	<b>1.647.410.000</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	48 kali	106.600.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan operasi pengumpulan data dan informasi serta pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan	48 kali	106.600.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Kota Pekalongan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan gangguan trantibum yang ditangani	365 kasus	450.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Kota Pekalongan	1. Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	200 kasus	275.000.000	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 2. Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan	6 kali		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1. Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 2. Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan 4. Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, HUT Tk. Kota) 5. Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan 6. Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	365 hari 120 hari 4 kegiatan 25 kali 220 kali 48 kali	1.020.410.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1. Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 2. Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan 4. Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, HUT Tk. Kota) 5. Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	365 hari 120 hari 4 kegiatan 25 kali 48 kali	1.020.410.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	35 orang	25.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	1. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 2. Jumlah kegiatan pemberdayaan linmas yang dilaksanakan	35 orang 3 kali	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan	5 kali	48.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	1. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 kali  150 orang	48.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	4 kali	148.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	4 kali	148.000.000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan akibat dari pelaksanaan penegakan perda dan perkada	1 orang	25.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 laporan	25.000.000	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>20 Perda</b>	<b>4.413.351.000</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>20 Perda</b>	<b>4.182.926.000</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal	27 kelurahan	270.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal	27 kelurahan	213.265.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang	12 kali	20.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	12 kali	20.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Ko		dilaksanakan			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Ko					
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah operasi penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	24 kali	4.123.351.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah operasi penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	96 kali	3.949.661.000	
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</b>	<b>13 persen</b>	<b>19.963.000</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</b>	<b>13 persen</b>	<b>19.963.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	19.963.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 laporan	19.963.000	
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.184.478.000</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>927.725.000</b>	
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>980.203.000</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>723.000.000</b>	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang dilaksanakan	6 kali	53.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang dilaksanakan	6 kali	53.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	185 kali	842.203.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	185 kali	600.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	1 unit	15.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	0 unit	0	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 kali	20.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3 kali	20.000.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Persentase pengelolaan data SKIK yang dilaksanakan	100 persen	10.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	1. Jumlah HT yang diadakan 2. Persentase pengelolaan data SKIK yang dilaksanakan	1 buah 100 persen	10.000.000	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kota Pekalongan	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati	3 dokumen	40.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kota Pekalongan	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati	3 dokumen	40.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya</b>	<b>100 persen</b>	<b>46.426.000</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya</b>	<b>100 persen</b>	<b>46.426.000</b>	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi/instansi/badan	48 dokumen	46.426.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi/instansi/badan	48 dokumen	46.426.000	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>83.567.000</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>83.567.000</b>	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran	4 kali	50.000.000	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran	4 kali	50.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan seksi pemadam kebakaran	5 orang	33.567.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Relawan Damkar	2 kali	33.567.000	
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase penanganan kondisi membahayakan</b>	<b>100 persen</b>	<b>74.282.000</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>Persentase penanganan kondisi membahayakan</b>	<b>100 persen</b>	<b>74.282.000</b>	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah laporan kondisi membahayakan yang ditangani	48 kali	74.282.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	48 Laporan	74.282.000	

## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Akan tetapi pada Musrenbang Kota, Belum ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32 sebagaimana terlampir.

Tabel T.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah provinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum,



Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
- f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
- j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
  - Sasaran 1.2 : Meningkatnya penanganan bencana kebakaran
2. Tujuan 2 : Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum
  - Sasaran 2.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2022 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,28
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai Sakip Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	73
		b. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	b. Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
2.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		1. Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%
		a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	70%

### III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2022 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2022. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 13.124.265.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>11.894.848.000</b>				<b>12.737.740.000</b>
<b>01.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>11.894.848.000</b>				<b>12.737.740.000</b>
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</li> <li>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</li> </ol>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>5.117.274.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>5.439.494.000</b>
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>16.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>62.450.000</b>
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen renja yang disusun</li> <li>Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun</li> </ol>	Kota Pekalongan	3 dokumen 1 dokumen	2.500.000	<b>DAU</b>		4 dokumen 1 dokumen	10.750.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.500.000	<b>DAU</b>		2 dokumen	1.650.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun 2. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) 3. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 4. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Kota Pekalongan	4 dokumen 2 dokumen 12 bulan 5 dokumen	12.000.000	DAU		4 dokumen 2 dokumen 12 bulan 5 dokumen	50.050.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	4.257.134.000	DAU		100 persen	4.376.416.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	12 bulan	4.203.484.000	DAU		12 bulan	4.322.766.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Pekalongan	12 bulan	52.000.000	DAU		12 bulan	52.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.650.000	DAU		1 dokumen	1.650.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	9.500.000	DAU		100 persen	93.265.000
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	Kota Pekalongan	2 kali	9.500.000	DAU		2 kali	9.500.000
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	0 kali	0	DAU		11 kali	83.765.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	239.439.000	DAU		100 persen	220.498.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU		12 bulan	7.500.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekalongan	12 bulan 0 unit	34.939.000	DAU		12 bulan 0 unit	30.998.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000.000	DAU		12 bulan	10.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekalongan	12 bulan	97.000.000	DAU		12 bulan	97.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU		12 bulan	7.500.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	DAU		12 bulan	2.500.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kota Pekalongan	124 kali	80000.000	DAU		124 kali	65.000.000
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>130.458.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>127.651.000</b>
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	12 bulan	2.000.000	DAU		12 bulan	2.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 bulan	128.458.000	DAU		12 bulan	125.651.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Pekalongan	100 persen	<b>464.743.000</b>	<b>DAU</b>		100 persen	<b>559.214.000</b>
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	28 unit	444.743.000	<b>DAU</b>		28 unit	400.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Kota Pekalongan	2 unit	0	<b>DAU</b>		2 unit	119.214.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	20.000.000	<b>DAU</b>		12 bulan	40.000.000
<b>01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>62 persen</b>	<b>5.850.299.000</b>	<b>DAU</b>		<b>62 persen</b>	<b>6.123.324.000</b>
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>85 persen</b>	<b>1.647.410.000</b>	<b>DAU</b>		<b>85 persen</b>	<b>1.819.110.000</b>
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan operasi pengumpulan data dan informasi serta pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	48 kali	106.600.000	DAU		48 kali	106.600.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	1. Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	Kota Pekalongan	200 kasus	275.000.000	DAU		200 kasus	446.700.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 2. Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan		6 kali				6 kali	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan 2. Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan 4. Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, HUT Tk. Kota) 5. Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	365 hari 120 hari 4 kegiatan 25 kali 48 kali	1.020.410.000	DAU		365 hari 120 hari 4 kegiatan 25 kali 48 kali	1.020.410.000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 2. Jumlah kegiatan pemberdayaan linmas yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	35 orang 3 kali	20.000.000	DAU		35 orang	25.000.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang dilaksanakan 2. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Pekalongan	5 kali 150 orang	48.000.000	DAU		5 kali	48.000.000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	4 kali	148.000.000	DAU		4 kali	148.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Ketertiban Umum								
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Pekalongan	2 laporan	25.000.000	DAU		2 laporan	25.000.000
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>20 Perda</b>	<b>4.182.926.000</b>	<b>DAU</b>		<b>20 Perda</b>	<b>4.284.680.000</b>
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal	Kota Pekalongan	27 kelurahan	213.265.000	DAU		27 kelurahan	218.699.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	12 kali	20.000.000	DAU		12 kali	20.000.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	96 kali	3.949.661.000	DAU		96 kali	4.045.981.000
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>13 persen</b>	<b>19.963.000</b>	<b>DAU</b>		<b>11 persen</b>	<b>19.534.000</b>
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kota Pekalongan	3 laporan	19.963.000	DAU		3 orang	19.534.000
<b>01.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	<b>927.275.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 persen</b>	<b>1.174.922.000</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran</b>	Kota Pekalongan	<b>100 persen</b>	723.000.000	DAU		100 persen	975.040.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	6 kali	53.000.000	DAU		6 kali	53.000.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	Kota Pekalongan	185 kali	600.000.000	DAU		185 aduan	837.040.000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Kota Pekalongan	0 unit	0	DAU		3 unit	15.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kota Pekalongan	3 kali	20.000.000	DAU		2 kali	20.000.000
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1. Jumlah HT yang diadakan 2. Persentase pengelolaan data SKIK yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	1 buah 100 persen	10.000.000	DAU		3 buah	10.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah rakor dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati	Kota Pekalongan	3 dokumen	40.000.000	DAU		3 dokumen	40.000.000
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	46.426.000	<b>DAU</b>		100 persen	45.428.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi/instansi/badan	Kota Pekalongan	48 dokumen	46.426.000	DAU		48 dokumen	45.428.000
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	83.567.000	<b>DAU</b>		100 persen	81.770.000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Pekalongan	4 kali	50.000.000	DAU		4 kali	50.000.000
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pembinaan Relawan Damkar	Kota Pekalongan	2 kali	33.567.000	DAU		2 kali	31.770.000
<b>1.05.04.2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase penanganan kondisi membahayakan</b>	<b>Kota Pekalongan</b>	<b>100 persen</b>	74.282.000	<b>DAU</b>		100 persen	72.684.000
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	48 Laporan	74.282.000	DAU		48 Laporan	72.684.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan rencana program dan kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 terdapat 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Setiap sub kegiatan juga telah dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

## BAB V PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 3 Agustus 2022  
Kepala Pelaksana,  
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan  
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos, M.Si  
NIP. 19680709 199003 1 008